

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Evaluasi

Sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mandiri, evaluasi didukung oleh sejumlah beberapa teori. Daniel L, Stufflebean dan Anthony J. Shinkfield (2007) mendefinisikan teori evaluasi program sebagai berikut :

“ A program evaluation theory is coherent set of conceptual, hypothetical, pragmatic, and ethical principles forming a general framework to guide the study and practice of program evaluation ”

Menurut mereka teori evaluasi program mempunyai enam ciri yaitu : pertalian konsep-konsep inti, hipotesis – hipotesis teruji mengenai bagaimana prosedur-prosedur evaluasi menghasilkan keluaran yang diharapkan ; prosedur – prosedur yang dapat diterapkan ; persyaratan-persyaratan etika; dan kerangka umum untuk mengarahkan praktik evaluasi program dan melaksanakan penelitian mengenai evaluasi program ⁸

Edward A. Suchman, professor of sociology university of pittsburg menulis buku berjudul *evaluative Research : Principles and practice in public service and social action program* (1987) yang menunjukkan pandangannya mengenai evaluasi sebagai bentuk penelitian. Dia membedakan antara evaluasi sebagai suatu pemakaian pendapat umum (*common sense*) yang menunjukkan suatu proses social

⁸ Wirawan. 2011. Evaluasi teori, model, standar, aplikasi, dan profesi. Jakarta, Rajawali press Raja Grafindo Persada. hal 30

membuat penilaian mengenai manfaat (worth) dan *evaluation research* (riset evaluatif) yang memakai metode metode dan teknik penelitian saintifik . Ia menggunakan kata evaluative sebagai suatu ajektif menspesifikasi suatu jenis riset. Ia menyatakan pentingnya melaksanakan riset evaluative dengan menggunakan metode saintifik.

Stufflebean dan srinkfield (2007) mengemukakan bahwa suchman mendukung pendapat bigman mengenai tujuan evaluasi adalah untuk :

1. Menemukan apakah dan seberapa baik objektif program terpenuhi
2. Menentukan alasan sukses atau kegagalan suatu program
3. Membuka prinsip prinsip yang membuat program sukses
4. Mengarahkan proses eksperimen eksperimen dengan teknik teknik untuk meningkatkan efektivitasnya.

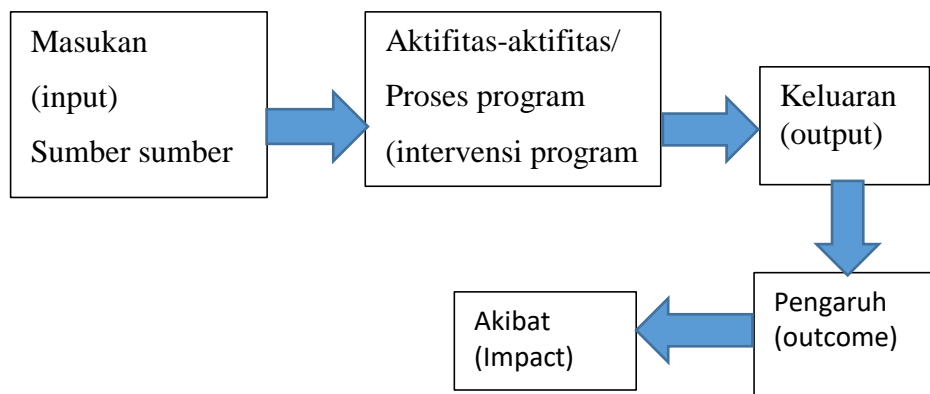
Jika teori evaluasi berkaitan dengan bagaimana melaksanakan evaluasi dan teori ilmu sosial berkaitan dengan program sosial , teori program berkenaan dengan esensi program yaitu tujuan program, perlakuan program , perubahan yang diharapkan dari pelaksanaan program. Menurut Rossi, Lipsey dan Freeman(2004), teori program terdiri dari tiga komponen yaitu :

1. Rencana organisasi. Berkaitan dengan bagaimana menyimpan, mengkonfigurasi dan membagi sumber sumber, dan mengorganisasi aktivitas program sehingga penyajian system layanan yang ingin dicapai dikembangkan dan dipertahankan
2. Rencana program dan pemanfaatan layanan. Berhubungan dengan bagaimana populasi target yang dituju menerima sejumlah layanan yang diharapkan dari

intervensi yang direncanakan melalui interaksi dengan system penyajian layanan program.

3. Pengaruh dari teori. Komponen ini mengemukakan bagaimana intervensi yang dituju untuk populasi target menghasilkan benefit sosial yang di inginkan.

Rencana organisasi dan layanan membentuk teori proses program dan pengaruh dari komponen komponen program yang disebut sebagai logika program (*program logic*). Logika program adalah suatu cara sistematis dan visual untuk melukiskan berbagai pemahaman hubungan diantara sumber sumber untuk mengoperasikan program, aktivitas yang direncanakan akan dilakukan, dan perubahan atau hasil yang diharapkan akan dicapai. Logika program dibuat sebagai flowcat sistematis yang berisi tulisan yang menggambarkan proses proses kegiatan dan hasil kegiatan yang bisa dengan mudah dibaca, dan dianalisis. Melalui logika program peneliti akan lebih mudah mengevaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu program dengan cepat.



Tujuan penyusunan model logika program adalah :

1. Mengidentifikasi pengaruh (outcome) jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang program
2. Menghubungkan pengaruh satu sama lain dengan aktivitas program dan masukan – masukan dengan mempergunakan logika yang teridentifikasi, teori atau model untuk program, misalkan melukiskan sebab akibat yang dihipotesiskan
3. Melukiskan keluaran keluaran jangka sedang dan pengaruh pengaruh yang harus terjadi sebelum pengaruh jangka panjang terjadi.
4. Membuat teori program implisit menjadi eksplisit.⁹

B. Model Evaluasi Program

Ada banyak model evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli yang dapat dipakai dalam mengevaluasi program pembelajaran. Berikut akan diuraikan beberapa model evaluasi program yang populer dan banyak dipakai sebagai strategi atau pedoman kerja dalam pelaksanaan evaluasi program yaitu:

1. Evaluasi Model Kirkpatrick

Kirkpatrick salah seorang ahli evaluasi program pelatihan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM). Model evaluasi yang dikembangkan oleh Kirkpatrick dikenal dengan istilah Kirkpatrick *Four Levels Evaluation Model*. Evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan (*training*)

⁹ Wirawan.2011.*Evaluasi teori, model, standar, aplikasi, dan profesi*. (Jakarta, Rajawali press Raja Grafindo Persada).71

menurut Kirkpatrick (1998) dalam Eko Putro Widoko (2010) mencakup empat level evaluasi, yaitu: level 1 *reaction*, level 2 *learning*, level 3 *behavior*, dan level 4 *result*. Penjelasanannya adalah sebagai berikut :

1). Evaluasi reaksi (*reaction evaluation*)

Mengevaluasi terhadap reaksi peserta training berarti mengukur kepuasan peserta. Program training dianggap efektif apabila proses training dirasa menyenangkan dan memuaskan bagi peserta training, sehingga mereka tertarik dan termotivasi untuk belajar dan berlatih. Dengan kata lain peserta training akan termotivasi apabila proses training berjalan secara memuaskan bagi peserta yang pada akhirnya akan memunculkan reaksi dari peserta yang menyenangkan. Sebaliknya apabila peserta tidak merasa puas terhadap proses training yang diikutinya mereka tidak akan termotivasi untuk mengikuti training.

Partner (2009) mengemukakan bahwa “*the interest, attention and motivation of the participants are critical to the success of any training program, people learn better when they react positively to the learning environment*”. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan proses kegiatan training tidak terlepas dari minat, perhatian, dan motivasi peserta pelatihan dalam mengikuti jalannya kegiatan pembelajaran. Orang akan belajar lebih baik manakala mereka memberi reaksi positif terhadap lingkungan belajar.

Kepuasan peserta dapat dikaji dari beberapa aspek, yaitu materi yang diberikan, fasilitas yang tersedia, strategi penyampaian materi yang digunakan oleh instruktur, media pembelajaran yang tersedia, waktu pelaksanaan pembelajaran, hingga gedung tempat pembelajaran dilaksanakan. Mengukur reaksi dapat dilakukan dengan *reaction sheet* dalam bentuk angket sehingga lebih mudah dan lebih efektif.

2). Evaluasi belajar (*learning evaluating*)

Ada tiga hal yang dapat diajarkan dalam program training, yaitu pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Peserta training dikatakan telah belajar apabila pada dirinya telah mengalami perubahan sikap, perbaikan pengetahuan maupun peningkatan keterampilan. Oleh karena itu untuk mengukur efektivitas program training maka ketiga aspek tersebut perlu untuk diukur. Tanpa adanya perubahan sikap, peningkatan pengetahuan atau keterampilan pada peserta training maka program dapat dikatakan gagal.

Penilaian *learning evaluating* ini ada yang menyebut dengan penilaian hasil (*output*) belajar. Mengukur hasil belajar lebih sulit dan memakan waktu dibandingkan dengan mengukur reaksi. Mengukur reaksi dapat dilakukan dengan *reaction sheet* dalam bentuk angket sehingga lebih mudah dan lebih efektif. Menurut Kirkpatrick (1998: 40), untuk menilai hasil belajar dapat dilakukan dengan kelompok pembanding. Kelompok

yang ikut pelatihan dan kelompok yang tidak ikut pelatihan diperbandingkan perkembangannya dalam periode waktu tertentu. Dapat juga dilakukan dengan membandingkan hasil pretest dengan posttest, tes tertulis maupun tes kinerja (*performance test*).

3). Evaluasi perilaku (*behavior evaluation*)

Evaluasi pada level ke 3 (evaluasi tingkah laku) ini berbeda dengan evaluasi terhadap sikap pada level ke 2. Penilaian sikap pada evaluasi level 2 difokuskan pada perubahan sikap yang terjadi pada saat kegiatan pembelajaran dilakukan sehingga lebih bersifat internal, sedangkan penilaian tingkah laku difokuskan pada perubahan tingkah laku peserta setelah selesai mengikuti pembelajaran. Sehingga penilaian tingkah laku ini lebih bersifat eksternal. Karena yang dinilai adalah perubahan perilaku setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dan kembali ke lingkungan mereka maka evaluasi level 3 ini dapat disebut sebagai evaluasi terhadap *outcomes* dari kegiatan pelatihan.

Evaluasi perilaku dapat dilakukan dengan membandingkan perilaku kelompok kontrol dengan perilaku peserta training, atau dengan membandingkan perilaku sebelum dan sesudah mengikuti training maupun dengan mengadakan survei atau interview dengan pelatih, atasan maupun bawahan peserta training setelah mereka kembali ketempat kerja.

4). Evaluasi hasil (*result evaluation*)

Evaluasi hasil dalam level ke 4 ini difokuskan pada hasil akhir (*final result*) yang terjadi karena siswa telah mengikuti suatu program pembelajaran. Termasuk dalam kategori hasil akhir dari suatu program pembelajaran diantaranya adalah peningkatan hasil belajar, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan (*skills*).

Beberapa program mempunyai tujuan meningkatkan moral kerja maupun membangun *teamwork* (kerjasama tim) yang lebih baik. Dengan kata lain adalah evaluasi terhadap *impact program* (pengaruh program). Tidak semua pengaruh dari sebuah program dapat diukur dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu evaluasi level 4 ini lebih sulit di bandingkan dengan evaluasi pada level-level sebelumnya. Evaluasi hasil akhir ini dapat dilakukan dengan membandingkan kelompok kontrol dengan kelompok peserta pembelajaran, mengukur kemampuan siswa sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran apakah ada peningkatan atau tidak (Kirkpatrick, 1998: 61).

Dibandingkan dengan model evaluasi yang lain, model ini memiliki beberapa kelebihan yaitu: 1) lebih komprehensif, karena mencakup *had skill* dan *soft skill*. 2) objek evaluasi tidak hanya hasil belajar semata tapi juga mencakup proses, *output* dan *outcomes*. 3) mudah untuk diterapkan. Selain kelebihan tersebut model ini juga memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: 1) kurang memperhatikan *input*. 2)

untuk mengukur *impact* sulit dilakukan karena selain sulit tolak ukurnya juga sudah di luar jangkauan guru maupun sekolah.

2. Model Evaluasi CIPP

Model evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam & Shinkfield (1985) adalah sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambil keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*) untuk memberikan bantuan kepada administrator atau leader pengambil keputusan. Stufflebeam mengemukakan bahwa hasil evaluasi akan memberikan alternatif pemecahan masalah bagi para pengambil keputusan. Model evaluasi CIPP ini terdiri dari 4 komponen yang diuraikan sebagai berikut:

1). Evaluasi konteks

Evaluasi konteks mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi obyektif yang akan dilaksanakan. Berisi tentang analisis kekuatan dan kelemahan obyek tertentu (Eko Putro Widoyoko: 2010). Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin (2009) menjelaskan bahwa, evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek.

2). Input evaluasi

Tahap kedua dari model CIPP adalah evaluasi *input*, atau evaluasi masukan. Menurut Eko Putro Widoyoko, evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternative apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi masukan meliputi: 1) Sumber daya manusia, 2) Sarana dan peralatan pendukung, 3) Dana atau anggaran, dan 4) Berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.

3). Evaluasi proses

Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki.

4). Evaluasi produk/ hasil

Evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian/ keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap evaluasi inilah seorang evaluator dapat menentukan atau memberikan rekomendasi kepada evaluasi apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan/modifikasi, atau bahkan dihentikan.

Menurut Eko Putro Widoyoko model evaluasi CIPP lebih komprehensif diantara model evaluasi lainnya, karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata tetapi juga mencakup konteks, masukan, proses, dan hasil. Selain kelebihan tersebut, di satu sisi model evaluasi ini juga memiliki keterbatasan, antara lain penerapan model ini dalam bidang program pembelajaran dikelas mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi jika tidak adanya modifikasi.

3. Evaluasi Model Wheel (roda) dari Beebe

Model evaluasi ini berbentuk roda karena menggambarkan usaha evaluasi yang berkaitan dan berkelanjutan dan satu proses ke proses selanjutnya. Model ini digunakan untuk mengetahui apakah pelatihan yang dilakukan suatu instansi telah berhasil, untuk itu diperlukanlah sebuah alat untuk mengevaluasinya. Secara singkat, model *wheel* ini mempunyai 3 tahap utama. Tiga tahap tersebut adalah pembentukan tujuan pembelajaran, pengukuran *outcomes* pembelajaran, dan penginterpretasian hasil pengukuran dan penilaian.

4. Evaluasi Model Provus

Evaluasi kesenjangan program, begitu orang menyebutnya. Kesenjangan program adalah sebagai suatu keadaan antara yang diharapkan dalam rencana dengan yang dihasilkan dalam pelaksanaan program. Evaluasi kesenjangan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standard

yang sudah ditentukan dalam program dengan penampilan aktual dari program tersebut (Eko Putro Widoyoko: 2010).

Dengan demikian tujuan dari model ini adalah untuk menganalisis suatu program sehingga dapat ditentukan apakah suatu program layak diteruskan, ditingkatkan dan sebaliknya yang disesuaikan dengan standar, *performance*, dan *discrepancy*.

5. Evaluasi Model Stake

Stake menekankan adanya dua dasarkegiatan dalam evaluasi, yaitu *description* dan *judgement* dan membedakan adanya tiga tahap dalam program pendidikan yaitu *context*, *process* dan *outcomes*. Stake menyatakan bahwa apabila menilai suatu program pendidikan, maka harus melakukan perbandingan yang relatif antara satu program dengan yang lainnya. Dalam model ini *antecedent* (masukan), *transaction* (proses) dan *outcomes* (hasil) data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan antara tujuan dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut untuk menilai manfaat program (Farida Yusuf Tayibnapis, 2000:22)

6. Evaluasi Model Brinkerhoff

Brinkerhoff & Cs. (1983) mengemukakan tiga golongan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, seperti

evaluator-evaluator lain, namun dalam komposisi dan versi mereka sendiri sebagai berikut:

1). Fixed vs Emergent Evaluation Design

Desain evaluasi fixed (tatap) harus direncanakan dan disusun secara sistematis-terstruktur sebelum program dilaksanakan. Meskipun demikian, desain fixed dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan yang sewaktu-waktu dapat berubah. Desain evaluasi ini dikembangkan berdasarkan tujuan program, kemudian disusun pertanyaan-pertanyaan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu. Begitu juga dengan model analisis yang akan digunakan harus dibuat sebelum program dilaksanakan.

Kegiatan-kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam desain fixed ini, antara lain menyusun pertanyaan-pertanyaan, menyusun dan menyiapkan instrumen, menganalisis hasil evaluasi, dan melaporkan hasil evaluasi secara formal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk mengumpulkan data dalam desain ini dapat digunakan berbagai teknik, seperti tes, observasi, wawancara, kuesioner, dan skala penilaian.

2). Formative vs Summative Evaluation

Evaluasi formatif berfungsi untuk memperbaiki kurikulum dan pembelajaran, sedangkan evaluasi sumatif berfungsi untuk melihat

kemanfaatan kurikulum dan pembelajaran secara menyeluruh. Artinya, jika hasil kurikulum dan pembelajaran memang bermanfaat bagi semua pihak yang terkait (terutama peserta didik) maka kurikulum dan pembelajaran dapat dihentikan.

3). Desain eskprimental dan desain quasi eskprimental vs natural inquiry

Desain eksperimental banyak menggunakan pendekatan kuantitatif, random sampling, memberikan perlakuan, dan mengukur dampak. Tujuannya adalah untuk menilai manfaat hasil percobaan program pembelajaran. Untuk itu, perlu dilakukan manipulasi terhadap lingkungan dan pemilihan strategi yang dianggap pantas. Jika prosesnya sudah terjadi, evaluator cukup melihat dokumen-dokumen sejarah atau menganalisis hasil tes. Jika prosesnya sedang terjadi, evaluator dapat melakukan pengamatan atau wawancara dengan orang-orang yang terlibat. Untuk itu, kriteria internal dan eksternal sangat diperlukan.

Selain berbagai model tersebut, Nana Sudjana dan Ibrahim (2004: 234) mengelompokkan model-model evaluasi pendidikan berdasarkan perkembangannya menjadi 4 kelompok yaitu:

1. Measurement Model

Model ini dipandang sebagai model tertua di dalam sejarah evaluasi dan telah banyak dikenal di dalam proses evaluasi pendidikan. Tokoh-tokoh

evaluasi yang dipandang sebagai pengembang model ini adalah R. Thorndike dan R.L. Ebel.

Sesuai dengan namanya, model ini sangat menitikberatkan peranan kegiatan pengukuran di dalam melaksanakan proses evaluasi. Pengukuran dipandang sebagai suatu kegiatan yang ilmiah dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang persoalan termasuk ke dalamnya bidang pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa menurut model ini, evaluasi pendidikan pada dasarnya tidak lain adalah pengukuran terhadap berbagai aspek tingkah laku dengan tujuan untuk melihat perbedaan-perbedaan individual atau kelompok, yang hasilnya diperlukan dalam rangka seleksi, bimbingan, dan perencanaan pendidikan bagi para siswa di sekolah.

Yang dijadikan objek dari kegiatan evaluasi model ini adalah tingkah laku, terutama tingkah laku siswa. Aspek tingkah laku siswa yang dinilai di sini mencakup kemampuan hasil belajar, kemampuan pembawaan, minat, sikap, dan juga aspek-aspek kepribadian siswa. Dengan kata lain, objek evaluasi di sini mencakup baik aspek kognitif maupun dengan kegiatan evaluasi pendidikan di sekolah, model ini menitikberatkan pada pengukuran terhadap hasil belajar yang dicapai siswa pada masing-masing bidang pelajaran dengan menggunakan tes.

2. Congruence Model

Model kedua ini dapat dipandang sebagai reaksi terhadap model yang pertama. Tokoh-tokoh evaluasi yang merupakan pengembang model ini antara lain adalah Raph W. Tyler, John B. Carroll, dan Lee J. Cronbach. Menurut model ini, evaluasi itu tidak lain adalah usaha untuk memeriksa persesuaian (*congruence*) antara tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan dan hasil belajar yang telah dicapai. Berhubung tujuan-tujuan pendidikan menyangkut perubahan-perubahan tingkah laku yang diinginkan pada diri anak didik, maka evaluasi yang diinginkan itu telah terjadi. Hasil evaluasi yang diperoleh berguna bagi kepentingan menyempurnakan sistem bimbingan siswa dan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak di luar pendidikan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai.

Objek evaluasi dalam model ini adalah tingkah laku siswa. Secara lebih khusus, yang dinilai di sini adalah perubahan tingkah laku yang diinginkan yang diperhatikan oleh siswa pada akhir kegiatan pendidikan. Tingkah laku hasil belajar ini tidak hanya terbatas pada aspek pengetahuan, melainkan juga mencakup aspek keterampilan dan sikap, sebagai hasil dari proses pendidikan.

3. Educational System Evaluation Model

Model ketiga yang ini merupakan reaksi terhadap kedua model terdahulu. Tokoh-tokoh evaluasi yang dipandang sebagai pengembang dari model yang ketiga ini antara lain adalah Daniel L. Stufflebeam, Michael

Scriven, Robert E. Stake dan Malcolm M. Provus. Model ini bertitik tolak dari pandangan, bahwa keberhasilan dari suatu sistem pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Evaluasi menurut model ini dimaksudkan untuk membandingkan *performance* dari berbagai dimensi sistem yang sedang dikembangkan dengan sejumlah kriteria tertentu, untuk akhirnya sampai pada suatu deskripsi dan *judgement* mengenai sistem yang dinilai tersebut.

4. Illuminative Model

Model yang keempat ini dikembangkan sebagai reaksi terhadap dua model evaluasi yang pertama, yaitu *measurement* dan *congruence*. Model ini dikembangkan terutama di Inggris dan banyak dikaitkan dengan pendekatan dalam bidang antropologi. Salah seorang tokoh yang paling menonjol dalam usahanya mengembangkan model ini adalah Malcolm Parlett.

Tujuan evaluasi menurut model yang keempat ini adalah mengadakan studi yang cermat terhadap sistem yang bersangkutan. Hasil evaluasi yang dilaporkan lebih bersifat deskripsi dan interpretasi, bukan pengukuran dan prediksi. Oleh karena itu dalam pelaksanaan evaluasi, model yang keempat ini lebih banyak menekankan pada penggunaan *Judgement*.

Model ini juga memandang fungsi evaluasi sebagai bahan atau *input* untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam rangka penyesuaian-penyesuaian dan penyempurnaan sistem yang sedang dikembangkan.

C. Ketepatan Penentuan Model Evaluasi Program

Makna ketepatan model evaluasi bagi program yang di evaluasikan mengandung makna bahwa ada harapan keeratan tautan antara evaluasi program dengan jenis program yang dievaluasi. Sesuai dengan bentuk kegiatannya, program ini dibedakan menjadi tiga yaitu (1) program pemrosesan, (2) program layanan, dan (3) program umum.

1. Program pemrosesan

Program pemrosesan adalah program yang kegiatan pokoknya mengubah bahan mentah (*input*) menjadi bahan jadi sebagai hasil proses atau keluaran (*output*). Contoh: program perpustakaan, program kepramukaan dan sebagainya.

2. Program Layanan (*service*)

Program Layanan adalah sebuah kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu sehingga merasa puas sesuai dengan tujuan program. Sebagai contoh adalah: program bank, program koperasi dan lain-lain.

3. Program Umum

Program Umum yaitu program yang tidak tampak apa yang menjadi ciri utama. Contohnya adalah: Program makanan tambahan anak Sekolah (PMTAS)

- a. Model Formatif – Sumatif ini dikemukakan oleh Michael Scriven. Menurut Scriven, tanggung jawab utama dari para penilai adalah membuat keputusan. Akan tetapi harus mengikuti peran dari penilaian yang bervariasi. Scriven menunjukkan dalam model formatif – sumatif bahwa adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan (disebut evaluasi formatif) dan ketika program sudah selesai atau berakhir (disebut evaluasi sumatif).
- b. Model CIPP ini dikembangkan oleh Stufflebeam dan kawan – kawan (1967) di *Ohio State University*. CIPP yang merupakan sebuah singkatan dari : Context evaluation, Input evaluation, Process evaluation, Product evaluation.
- c. Model CIRO ini dikembangkan oleh Warr, Bird, dan Rackman pada tahun 1970. CIRO merupakan model yang paling banyak digunakan di dalam melakukan evaluasi terhadap suatu pelatihan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui dampak pelatihan terhadap tujuan organisasi. Model CIRO merupakan singkatan dari Context, Input, Realisasi, dan Output.
- d. Model Kirkpatrick ini dikembangkan oleh Donald Kirkpatrick dan telah digunakan sejak tahun 1950-an. Model ini dipergunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pelatihan. Model Kirkpatrick ini memiliki 4 tingkatan atau langkah-langkah evaluasi, yaitu : tingkat I : evaluasi

- reaksi, tingkat II : evaluasi – learning, tingkat III : evaluasi – perilaku, tingkat IV : evaluasi – hasil.
- e. Model discrepancy dikembangkan oleh Malcolm Provus ini merupakan model yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen. Model yang dikembangkan oleh Malcolm Provus ini menekankan pada kesenjangan yang sebetulnya merupakan persyaratan umum bagi semua kegiatan evaluasi, yaitu mengukur adanya perbedaan antara yang seharusnya dicapai dengan yang sudah riil dicapai.

D. Teori Logic Model

Evaluasi program memiliki beberapa model yang dapat digunakan untuk melihat efektifitas sebuah program, salah satunya yaitu evaluasi program model logic. Menurut Bickman bahwa *logic model* adalah sebuah model evaluasi yang dapat dipercaya, mudah dipahami untuk memecahkan masalah yang telah identifikasi. Ia menambahkan bahwa *logic model* dapat menjadi dasar untuk gambaran yang meyakinkan tentang kinerja yang diharapkan program (Wholey, 2010:1).

Istilah Logic Model pertama kali di perkenalkan oleh Joseph S Wholey pada tahun 1979 dalam bukunya yang berjudul “Evaluation: Promise and Performance”. Logic model adalah alat untuk melakukan perencanaan

atas program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Disamping itu logic model juga dapat digunakan untuk melakukan evaluasi atas program atau kegiatan yang telah selesai maupun yang sedang berjalan serta program yang masih dalam tahap perencanaan (Kellog,2004)

Frechtling (2007) berpendapat bahwa *logic model* adalah alat yang menggambarkan sesuatu yang mendasari teori perubahan dari sebuah intervensi, terhadap hasil dan kebijakan. Sedangkan John Rogard Tabori dkk (2001) menyebutkan bahwa *logic model* adalah representasi gambaran dari sebuah proyek atau program. *logic model* merupakan sebuah visualisasi keterkaitan antara layanan yang diharapkan dan hasil yang diinginkan. Connel dan Kubis (2008) menjelaskan bahwa *logic model* adalah suatu gambaran yang sistematis mengenai teori perubahan, ia merupakan studi kumulatif dari keterkaitan antara aktifitas, outcomes dan konteks, atau untuk melihat bagaimana dan mengapa sebuah program bekerja. Logic Model adalah evaluasi program yang menggambarkan narasi atau grafis dalam kehidupan nyata yang mendasari suatu kegiatan.

Penyusunan logic model mencakup : Menentukan indikator dan sasaran kinerja yang mencakup masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak program; hubungan kausal antara indicator indicator tersebut; asumsi yang mengikuti tujuan di setiap tingkatan, yaitu faktor faktor luar yang tidak dapat di kontrol oleh program itu sendiri, tetapi dapat mempengaruhi tujuan program.

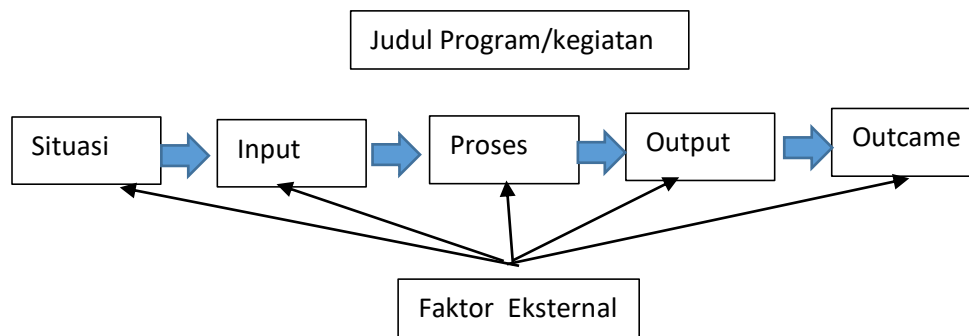
Komponen dalam logic model meliputi : input, yaitu komponen yang diperlukan system; process yaitu komponen dalam system yang mengubah inout menjadi output; output yaitu komponen yang dihasilkan oleh system; outcome yaitu komponen akibat yang dipengaruhi oleh relasi logis input,process(Frectling,2007) Komponen – komponen logic model menurut Cooksy et sl (2001) mempunyai beberapa alternatif penyajian yaitu diagram alur, template program, peta konsep, dan narasi. Sedang menurut Greenfield, William, and Eisman,(2006) sebuah logic model biasanya disajikan dalam bentuk jalur operasi program secara visual sederhana.

Logic model menurut Frecting (2007) memiliki diagram jalur dengan 4 (empat) komponen utama. Empat komponen utama dalam logic model adalah : masukan (input), kegiatan (activities) , keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Input, merupakan sumberdaya yang digunakan dalam satu program, biasanya sumberdaya yang ditetapkan berkaitan dengan sumber dana dalam bentuk kontribusi. Sumberdaya yang digunakan umumnya berupa waktu, orang, uang material dan peralatan
2. Activities; tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu program untuk mendapatkan hasil yang diharapkan . Kegiatan dapat berupa strategi atau metode yang digunakan oleh suatu program atau organisasi untuk mentransformasikan dan menyusun input agar menjadi hasil yang diinginkan organisasi atau program. Ellis salsabila(2013:100)

3. Output; hasil hasil langsung dari suatu kegiatan , berupa layanan, kajadian dan produks, dicatat dalam dokumen implementasi dari kegiatan. Biasanya dari hasil yang terukur , dalam jumlah maupun besaran , dari proses utama suatu organisasi.
4. Outcomes; sering diartikan sebagai hasil guna atau manfaat. Perubahan yang terjadi menu jukan gerakan terhadap pencapaian tujuan umum dan khusus. Keluaran yang diharapkan berupa prestasi atau perubahan.

Sehingga dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *logic model* adalah sebuah model evaluasi program yang sistematis untuk menggambarkan perubahan yang terjadi, serta menjabarkan hubungan logis antar tiap komponen, biasanya ditandai dengan hubungan kausalitas (sebab-akibat) dengan 6 komponennya yaitu situasi , input, proses, output dan outcamenya serta faktor eksternal yang dapat mempengaruhi program. Alur diagram logic model yang akan peneliti gunakan adalah diagram alur sebagai berikut :



E. Teori zakat

Zakat (Bahasa Arab: زكاة transliterasi: **Zakah**) dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Zakat dari segi bahasa berarti 'bersih', 'suci', 'subur', 'berkat' dan 'berkembang'. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam.¹⁰

Menurut kebahasaan, zakat itu bisa ditilik dari kata زكى(zakā), yang kalau dirangkaikan pada kalimat, yaitu زكا الشيء يزكو (sesuatu itu bertambah dan tumbuh), atau bisa pula زكا الزرع (tanaman itu tumbuh), dan pada yang lain seperti: زكت التجارة (perniagaan itu tumbuh dan berkembang). Inilah yang masuk ke dalam definisi awal zakat yang artinya adalah "tumbuh", "suci", dan "berkah". Dengan makna kebahasaan di atas, yakni "tumbuh" dan "suci", menurut Ibnu Hajar Al 'Asqalani, sesuai tinjauan syariat, maka itulah yang akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada harta dan pahala, terlebih juga, zakat itu berkaut pula dengan perdagangan dan pertanian.¹¹

Adapun secara makna, ia berarti nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan kepada fakir miskin, ini ditunjukkan oleh sebuah riwayat di mana Nabi Muhammad mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, untuk mengambil sebagian harta orang yang kaya agar diberikan kepada orang yang papa

¹⁰ Wikipedia bahasa Indonesia

¹¹ Al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Fatkul Bari diterjemahkan oleh Amiruddin. LC.Editor.Abu Rania,LC. Dan Titi Tartilah.* (Jakarta : Pustaka Azzam.2004)

di antara mereka. Adapun secara keistilahan, makna zakat dalam syariat Islam ialah arti seukuran tertentu beberapa jenis harta, yang wajib diberikan kepada golongan-golongan tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Bagian dari harta inilah yang dinamai zakat, dan didoakan oleh penerimanya agar diparingi keberkatan dari Allah. Tak jauh dengan ketentuan di atas, ia dikecualikan dari bani Hasyim dan bani Muthalib, dan ia wajib dikeluarkan bagi yang berakal, baligh, dan merdeka. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, disebutkan bahwasanya zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹²

Menurut kebahasaan, zakat itu bisa ditilik dari kata زكى (zakā), yang kalau dirangkaikan pada kalimat, yaitu زكا الشيء يزكو (sesuatu itu bertambah dan tumbuh), atau bisa pula زكا الزرع (tanaman itu tumbuh), dan pada yang lain seperti: زكت التجارة (perniagaan itu tumbuh dan berkembang). Inilah yang masuk ke dalam definisi awal zakat yang artinya adalah "tumbuh", "suci", dan "berkah". Dengan makna kebahasaan di atas, yakni "tumbuh" dan "suci", menurut Ibnu Hajar Al 'Asqalani, sesuai tinjauan syariat, maka itulah yang akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada harta dan pahala, terlebih juga, zakat itu berkaut pula dengan perdagangan dan pertanian.

¹² Zahari, Ahmad; Idham (*Wakaf, Zakat, & Ekonomi Syariah: Kumpulan Peraturan*. Pontianak: FH Untan Press. 2010). 201

Adapun secara makna, ia berarti nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan kepada fakir miskin,^[3] ini ditunjukkan oleh sebuah riwayat di mana Nabi Muhammad mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, untuk mengambil sebagian harta orang yang kaya agar diberikan kepada orang yang papa di antara mereka. Adapun secara keistilahan, makna zakat dalam syariat Islam ialah arti seukuran tertentu beberapa jenis harta, yang wajib diberikan kepada golongan-golongan tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Bagian dari harta inilah yang dinamai zakat, dan didoakan oleh penerimanya agar diparingi keberkatan dari Allah. Tak jauh dengan ketentuan di atas, ia dikecualikan dari bani Hasyim dan bani Muthalib, dan ia wajib dikeluarkan bagi yang berakal, baligh, dan merdeka. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, disebutkan bahwasanya zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.^[6]

Hikmah dari berzakat adalah :

1. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin.
2. Pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah.
3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.

5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan
6. Untuk pengembangan potensi umat
7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam
8. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.

Pengertian zakat menurut syara' adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Dengan kata lain, pengertian zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada golongan-golongan yang telah ditentukan yang merupakan hak milik golongan tersebut.

Berikut ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan mewajibkan kita untuk berzakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apapun yang kalian kerjakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kalian kerjakan”.

[Q.S Al Baqoroh:110].

إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu):
“Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. (QS. 2:83)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (QS. 9:11)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda didalam hadits yang sangat banyak sekali, diantaranya:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ

يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ

الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

“Islam didirikan di atas lima pondasi: 1- Bersaksi tiada tuhan selain Allah dan (Nabi) Muhammad utusan Allah. 2- Mendirikan sholat. 3-Mengeluarkan

zakat. 4-Haji ke Baitullah. 5-Puasa di bulan Ramadhan.”[H.R.Bukhori dan Muslim].

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ))

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka hendaknya menunaikan zakat hartanya”. [H.R.AtTabrani].

Menurut kaidah Islam terdapat delapan golongan yang memiliki hak untuk mendapatkan zakat, yaitu:

1. **Fakir**, yaitu golongan masyarakat yang nyaris tidak memiliki apapun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan utama dalam hidupnya.
2. **Miskin**, yaitu golongan masyarakat yang hartanya sangat sedikit tapi masih dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
3. **Amil**, yaitu orang-orang yang mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada yang berhak.
4. **Mu'allaf**, yaitu orang-orang yang baru memeluk agama Islam dan membutuhkan bantuan dalam menyesuaikan kondisi hidupnya.
5. **Gharimin**, yaitu orang-orang yang memiliki utang untuk mencukupi kebutuhannya dimana kebutuhan tersebut halal tapi tidak sanggup untuk membayar utangnya tersebut.
6. **Fisabilillah**, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah. Misalnya pendakwah, orang yang negaranya mengalami peperangan, dan lainnya.

7. **Ibnus Sabil**, yaitu orang-orang yang mengalami kehabisan uang dalam perjalanannya.
8. **Hamba sahaya**, yaitu budak atau orang-orang yang ingin memerdekakan dirinya.

F. Teori pemberdayaan masyarakat

Jamasy (2004) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggung jawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerja sama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Salah satu cara untuk meraihnya adalah dengan membuka kesempatan bagi seluruh komponen masyarakat dalam tahapan program pembangunan. Setiap komponen masyarakat selalu memiliki kemampuan atau berpotensi. Keutuhan potensi ini akan dapat dilihat apabila di antara mereka mengintegrasikan diri dan bekerja sama untuk dapat berdaya dan mandiri

Menurut Sulistiyani (2004) bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Shardlow (1998) dalam Adi (2008) pengertian pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Dalam kesimpulannya, Shardlow menggambarkan bahwa pemberdayaan sebagai sesuatu gagasan tidaklah jauh berbeda dengan gagasan Biestek (1961) dalam Notoatmodjo (2005) yang dikenal di bidang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial dengan nama "*self determination*". Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.

Menurut Nasikun (2000) paradigma pembangunan baru berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan terutama dilakukan atas inisiatif dan dorongan berbagai kepentingan masyarakat. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya; termasuk pemilikan serta penguasaan aset infrastrukturnya sehingga distribusi keuntungan dan manfaat akan lebih adil bagi masyarakat.

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Pranarka dan Vidhyandika, 1996). Selain itu proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu :

- 1). menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong (*encourage*) dan membangkitkan kesadaran (*awarenes*) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.
- 2). memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana.
- 3). memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh

karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat (Kartasasmita, 1995).

Berdasarkan dari beberapa teori pemberdayaan masyarakat yang disampaikan oleh para pakar, maka hakekat pemberdayaan masyarakat adalah usaha, upaya, kemauan dari setiap warga desa, perangkat desa, lembaga desa bersinergi untuk mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki dan berkeinginan untuk melakukan perubahan pada kehidupannya baik secara kelompok maupun individu, peningkatan skill maupun peningkatan ekonomi dan usaha produktifnya.

Dalam pemberdayaan masyarakat yang memegang peranan penting adalah sosialisasi program yang melibatkan seluruh kepentingan, berdiskusi tentang segala permasalahan di desa, potensi yang dimiliki, keinginan keinginan warga desa dan menentukan perencanaan pemberdayaan masyarakat sasaran, waktu dan pelaksanaannya, melaksanakan program pemberdayaan mengadakan evaluasi dan tindak lanjut. Jika seluruh warga, masyarakat dan lembaga desa secara aktif mengetahui dan memahami pemberdayaan yang akan dilakukan maka dapat meminimalisir konflik kepentingan dan kesuksesan sebuah program dan kegiatan. Tujuan akhir dari program pemberdayaan masyarakat adalah kemandirian.

Program pemberdayaan masyarakat bisa efektif dan memiliki motivasi yang kuat jika dilaksanakan di desa dengan kategori sangat tertinggal atau desa berkembang. Berikut beberapa kategori desa menurut kajian indeks desa membangun (IDM) yaitu sebagai berikut :

1. Kategori Desa Mandiri

Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada Yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

2. Kategori Desa Maju

Desa Maju atau bisa juga disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

3. Kategori Desa Berkembang

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

4. Kategori Desa Tertinggal

Desa Tertinggal atau bisa juga disebut dengan Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

5. Kategori Desa Sangat Tertinggal

Desa Sangat Tertinggal atau bisa juga disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya

Dalam Permendesa tentang IDM lebih lanjut di jelaskan untuk menentukan status sebuah desa, maka harus dihitung berdasarkan nilai indeks, yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM).

Lebih mudahnya untuk memahami kategori desa tersebut kita gambarkan seperti tabel di bawah ini :

Tabel. 1.6
Potensi desa

Potensi			Pengelolaan	Nilai IDM	Kategori
Sosial	Ekonomi	Lingkungan			
Ada	Ada	Ada	Mampu mengelola untuk peningkatan kesejahteraan	IDM > 0,8155	Mandiri

			masyarakat dan berkelanjutan tiap tahun		
Ada	Ada	Ada	Mampu mengelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat	$0,7072 < IDM \leq 0,8155$	Maju
Ada	Ada	Ada	Belum dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat	$0,5989 < IDM \leq 0,7072$	Berkembang
Ada	Ada	Ada	Belum atau kurang dikelola dan masih banyak yg miskin	$0,4907 < IDM \leq 0,5989$	Tertinggal
Rentan	Rentan	Rentan	Tidak mampu mengelola	$IDM \leq 0,4907$	Sangat Tertinggal

Dalam tabel diatas hal penting untuk menentukan status atau kategori sebuah desa adalah nilai IDM nya. Untuk mengukur dan mengetahui nilai IDM suatu desa rumus yang digunakan adalah : $IDM = (IKS+IKE+IKL)$

Dimana :

IDM : Nilai Indeks Desa Membangun

IKS : Nilai Indeks Ketahanan Sosial

IKE : Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi

IKL : Nilai Indeks Ketahanan Lingkungan

Jadi komponen yang menjadi penilaian untuk menentukan apakah status desa itu tergolong ke dalam Kategori Desa Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal adalah Faktor Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Lingkungan.

1. Ketahanan Sosial

A. Bidang Kesehatan

- Pelayanan Kesehatan
- Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan
- Jaminan Kesehatan

B. Bidang Pendidikan

- Akses Pendidikan Dasar dan Menengah
- Akses Pendidikan Non Formal
- Akses ke Pengetahuan Umum

C. Bidang Modal Sosial

- Memiliki Solidaritas Sosial
- Memiliki Toleransi
- Rasa Aman Penduduk
- Kesejahteraan Sosial

D. Bidang Permukiman

- Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak
- Akses ke Sanitasi
- Akses ke Listrik
- Akses Informasi dan Komunikasi

2. Ketahanan Ekonomi

A. Bidang ekonomi

- Keragaman Produksi Masyarakat Desa
- Tersedia Pusat Pelayanan Perdagangan
- Akses Distribusi/Logistik
- Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan
- Lembaga Ekonomi
- Keterbukaan Wilayah

3. Ketahanan Lingkungan

A. Bidang Lingkungan / Ekologi

- Kualitas Lingkungan
- Potensi rawan bencana dan tanggap bencana

Dengan demikian peneliti mengetahui kategori desa Mandiri, Desa maju, berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal. Sehingga secara umum masyarakat sudah bisa menggambarkan kategori desa masing-masing. Namun untuk penentuan secara rinci mengenai kategori desa perlu dilakukan penilaian-penilaian terhadap indikator IDM sebagaimana diatur dalam Permendesa Nomor 2 Tahun 2016, yaitu dengan cara mengisi formulir Kuisisioner perkembangan IDM yang biasanya dilakukan oleh pendamping Lokal Desa.